



SUBSTANSI

SUMBER ARTIKEL AKUNTANSI AUDITING DAN KEUANGAN



Artikel 2

Volume 6, Nomor 2,
Tahun 2023

24-05-2023

GOOD GOVERNANCE PEMERINTAH DESA: APAKAH DIPENGARUHI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, GAYA KEPEMIMPINAN, BUDAYA ORGANISASI?

Fitria Erayanti

Universitas Negeri Riau
fitriaerayantii@gmail.com

Yesi Mutia Basri

Universitas Negeri Riau
yesimutiabasri@lecturer.unri.ac.id

Nur Azlina*

Universitas Negeri Riau
nur.azlina@lecturer.unri.ac.id

* Penulis Koresponden: nur.azlina@lecturer.unri.ac.id

Dimasukkan:
14-07-2021

Direvisi:
22-12-2021

Diterima:
23-05-2023

Sitasi:

Erayanti, F., Basri, Y. M., & Azlina, N. (2023). *Good Governance Pemerintah Desa: Apakah Dipengaruhi Standar Akuntansi Pemerintah, Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi?. Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan* *Vokasi*, 6(2), 12–26.
<https://doi.org/10.35837/subs.v6i2.1257>

<https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/SUBS/article/view/1257>



Artikel ini dipersembahkan secara gratis dan terbuka oleh Program Diploma III Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Keuangan Negara STAN. Artikel ini telah diterima untuk dimasukkan ke dalam Jurnal Substansi: Sumber Akuntansi, Auditing, dan Keuangan oleh Tim Editor resmi Politeknik.

GOOD GOVERNANCE PEMERINTAH DESA: APAKAH DIPENGARUHI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, GAYA KEPEMIMPINAN, BUDAYA ORGANISASI?

Fitria Erayanti

Universitas Negeri Riau
fitriaerayantii@gmail.com

Yesi Mutia Basri

Universitas Negeri Riau
yesimutiabasri@lecturer.unri.ac.id

Nur Azlina*

Universitas Negeri Riau
nur.azlina@lecturer.unri.ac.id

*Corresponding Author: nur.azlina@lecturer.unri.ac.id

Abstrak:

Tujuan penelitian – Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sistem akuntansi pemerintah, gaya kepemimpinan, dan budaya organisasi terhadap penerapan *good governance* pemerintah desa Kabupaten Kampar.

Metode – Penelitian ini menggunakan metodologi survei dengan jumlah sampel sebanyak 41 pemerintah desa di Kabupaten Kampar dengan 132 responden yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan keuangan, ketua Badan Permusyawaratan Desa. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda.

Temuan penelitian – Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi pemerintah, gaya kepemimpinan, dan budaya organisasi mempengaruhi penerapan *good governance*. Semakin besar pengaruhnya akan semakin tinggi tingkat penerapan *good governance* pemerintah desa di Kabupaten Kampar.

Implikasi praktis – Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan pertimbangan pemerintah desa dalam merumuskan regulasi dan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan tata kelola pemerintah desa yang baik.

Kata kunci: Tata Kelola; Sistem Akuntansi; Budaya; Kepemimpinan; Pemerintah.

Abstract:

Research objective – This research aims to determine the effect of government accounting system, leadership style, and organizational culture on the good governance implementation in village governments in Kampar Regency.

Method – This research employed a survey methodology with total sample of 41 village governments in Kampar District with 132 respondents consisting of village heads, village secretaries, heads of financial affairs, heads of Village Consultative Councils. The data analysis used is multiple regression analysis.

Research findings – This research found that government accounting system, leadership style, and organizational culture affect the implementation of good governance. The greater the influence is the higher the level of Good Governance implementation in the village government in Kampar Regency will be.

Practical implication – This research is expected to contribute to the village governments as considerations in formulating appropriate policies to improve good village governance.

Keywords: Governance; Accounting System; Culture; Leadership; Government.

PENDAHULUAN

Dalam pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Undang-Undang tersebut mengatur bagaimana tata cara penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa, sehingga apabila pemerintah desa telah menerapkan Undang-Undang tersebut dalam pemerintahannya maka dapat tercipta tata kelola pemerintahan yang baik, atau yang kerap disebut *good governance*. Lembaga Administrasi Negara (2008: 53) memberikan pengertian *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Terdapat sembilan prinsip pada *good governance* menurut UNDP (*United Nations Development Programs*) yaitu partisipasi (*participation*), aturan hukum, transparansi, daya tanggap (*responsiveness*), berorientasi konsensus (*consensus orientation*), keadilan (*fairness*), efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas (*accountability*) dan bervisi strategi. Kesembilan prinsip tersebut saling memperkuat dan tidak dapat berdiri sendiri (Lembaga Administrasi Negara, 2008: 51-53).

The Worldwide Governance Indicators (WGI) (2017) menyebutkan bahwa terdapat enam indikator yang menyusun tingkat tata kelola di suatu negara, antara lain akuntabilitas, stabilitas politik dan terorisme, efektifitas pemerintahan, kualitas aturan, prinsip hukum (*rule of law*), dan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) (Indeks Desa Membangun, 2019). Namun dalam implementasinya, penerapan *good governance* belum berjalan dengan baik di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dari indeks dalam riset WGI (*the Worldwide Governance Indicators*), nilai dari keenam indikator tata kelola pemerintahan Indonesia tahun 2017 masih rendah (skor di bawah 60) dengan rincian nilai per komponen berturut-turut adalah 48 (*control of corruption*), 54 (*government effectiveness*), 29 (*political stability and absence of violence/terrorism*), 52 (*regulatory quality*), 41 (*rule of law*), dan 51 (*voice and accountability*). Berdasarkan hasil pemantauan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) sejak tahun 2015 hingga Semester I 2018, kasus korupsi dana desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tercatat sedikitnya sudah ada 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka korupsi. Dari segi pelaku, kepala desa menjadi aktor terbanyak untuk kasus korupsi dana desa. Selain kepala desa yang menjadi aktor, ICW mengidentifikasi potensi korupsi yang dapat dilakukan oleh beberapa aktor lain, yaitu perangkat desa dan istri kepala desa. ICW menilai, kasus korupsi dana desa ini terjadi karena berbagai faktor, mulai dari minimnya kompetensi aparat pemerintah desa, tidak adanya transparansi dan kurangnya pengawasan yang akan berakibat pada tata kelola pemerintah (Ihsanuddin, 2018).

Selain itu di Riau, Mantan kepala desa Gerbang Sari, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Miswoyanto diduga korupsi dana desa telah merugikan negara sekitar Rp 316 juta. Miswoyanto ditangkap di wilayah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 2019, selanjutnya tersangka dibawa ke Polres Kampar untuk dilakukan pemeriksaan. Dana desa tersebut merupakan bantuan dari APBN tahun 2016 sebesar Rp 616 juta yang diperuntukkan proyek fisik dan non fisik (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar, 2019), namun pada realisasinya dana tersebut hanya digunakan separuh dari anggaran yang ada sedangkan sisanya disalahgunakan oleh kepala desa sehingga melanggar prinsip akuntabilitas dan aturan hukum dalam *good governance*. (www.regional.kompas.com). Hal tersebut menunjukkan bahwa untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang responsif, bebas KKN, dan berkinerja, kondisi akuntabilitas dan transparansi merupakan kondisi yang harus ada untuk dipenuhi dalam mewujudkan *good governance* (Adelia, 2015). Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, perlu dipadukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah

dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggungjawab, dan bebas dari KKN, yang dalam penerapannya adalah membuat suatu tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik. (Manossoh, 2015)

Salah satu faktor yang mempengaruhi penerapan *good governance* pada pemerintah desa adalah Sistem Akuntansi Pemerintah (Sari, 2013). Sistem Akuntansi Pemerintah harus dirancang sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu Negara yang harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk penyusunan rencana atau program dan evaluasi pelaksanaan secara fisik dan keuangan. Menurut pasal 71 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa Keuangan Desa adalah hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Desa diwujudkan dalam Laporan Keuangan Pemerintahan Desa. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban keuangan Desa yang memadai, Laporan Keuangan Pemerintahan Desa disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa dalam Keppres Nomor 20 Tahun 2017 yang berisi tujuan laporan keuangan desa, tanggungjawab pelaporan keuangan desa, struktur dan isi, serta periode laporan keuangan (Pemerintah Republik Indonesia, 2017). Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Mailoor et al., (2017) di Kabupaten Kepulauan Talaud menunjukkan bahwa sistem akuntansi pemerintah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerapan *good governance*. Hubungan positif tersebut terjadi jika sistem dan prosedur yang digunakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), serta informasi laporan keuangan dilakukan secara konsisten dan periodik serta didukung dengan sumber daya manusia yang berkompeten (IAI-KASP, 2015). Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi penerapan *good governance* pada pemerintah desa yaitu gaya kepemimpinan (Nurul & Agung, 2019).

Gaya Kepemimpinan adalah proses untuk mempengaruhi orang lain untuk memahami dan setuju dengan apa yang perlu dilakukan dan bagaimana tugas itu dilakukan secara efektif, serta proses untuk memfasilitasi upaya individu dan kolektif untuk mencapai tujuan bersama (Yukl, 2010). Mengingat betapa pentingnya peranan kepemimpinan dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi, maka untuk meningkatkan kualitas pemerintahan desa yang sesuai dengan kriteria prinsip-prinsip *good governance* diperlukan kemampuan kepala desa untuk menjalankan gaya kepemimpinan yang dapat menciptakan motivasi yang tinggi dalam semua perangkat pemerintahan desa (Fathoni et al., 2015), dan yang dapat mengarahkan semua unsur yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa agar memiliki komitmen yang tinggi dalam mewujudkan *good governance* (Mewengkang, 2014). Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Hidayah dan Suprojo (2018) di Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji Kota Batu bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap penerapan *good governance*. Hasil analisis yang mereka lakukan mengungkapkan bahwa dengan adanya perubahan kepemimpinan situasional maka *good governance* juga akan mengalami peningkatan yang berarti adanya peningkatan dari indikator gaya kepemimpinan situasional yang meliputi perilaku kepemimpinan efektif, gaya tertentu, petunjuk pimpinan, adanya dukungan sosio emosional, tingkat kesiapan, kematangan para pengikut dan pengarahan dari pimpinan maka *good governance* akan mengalami peningkatan. Selain sistem akuntansi pemerintah dan gaya kepemimpinan, faktor lainnya yang dapat mempengaruhi penerapan *good governance* adalah budaya organisasi. Budaya organisasi adalah suatu karakteristik yang ada pada sebuah organisasi dan menjadi pedoman organisasi tersebut sehingga membedakannya dengan organisasi lainnya (Rivai et al., 2014). Dengan kata lain, budaya organisasi adalah norma perilaku dan nilai-nilai yang dipahami dan diterima oleh semua anggota organisasi dan digunakan sebagai dasar dalam aturan perilaku dalam organisasi tersebut. Budaya organisasi di dalam pemerintahan merupakan implementasi nilai-nilai luhur dari Pancasila.

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu Syafrion (2015) terhadap penerapan *Good Governance* di Kota Solok menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap penerapan *good governance*. Hal ini membuktikan bahwa budaya organisasi bisa membentuk karakteristik pegawai yang berkerja di dalam suatu pemerintahan. Dengan budaya organisasi yang baik maka akan melekatlah sikap yang baik pada pegawai tersebut (Rondonuwu et al, 2015).

Penelitian ini merupakan penelitian modifikasi dari penelitian Mailoor et al., (2017) mengenai Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintahan, Budaya Organisasi, Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Peran APIP, Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Penerapan *Good Governance* (Studi Empiris Di Kabupaten Kepulauan Talaud). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penambahan variabel yaitu gaya kepemimpinan dengan melakukan pengurangan terhadap beberapa variabel dalam penelitian tersebut. Alasan peneliti menambahkan variabel gaya kepemimpinan yaitu masih sedikitnya penelitian terdahulu yang meneliti variabel tersebut dan banyaknya kasus yang terjadi pada *good governance* yang melibatkan pemimpin. Penelitian ini juga bertujuan untuk menguji kembali tingkat signifikansi dari beberapa variabel seperti sistem akuntansi pemerintah dan budaya organisasi terhadap penerapan *good governance*. Perbedaan lainnya dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu apabila dalam penelitian sebelumnya banyak menggunakan objek penelitian pada pemerintahan daerah (SKPD) dan instansi terkait, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan objek penelitian pada pemerintah desa di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Dan juga apabila pada penelitian terdahulu banyak menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, maka pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif berupa data berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan dengan data primer menggunakan kuesioner. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka permasalahan penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: Apakah sistem akuntansi pemerintah, gaya kepemimpinan, dan budaya organisasi berpengaruh terhadap penerapan *good governance* pada Pemerintah Desa. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh sistem akuntansi pemerintah, gaya kepemimpinan, dan budaya organisasi terhadap penerapan *good governance* di pemerintah desa Kabupaten Kampar.

TINJAUAN PUSTAKA

Stewardship theory menjelaskan mengenai situasi yang mana para manajemen tidak termotivasi dengan tujuan individu melainkan termotivasi dengan kepentingan organisasi sebagai tujuan utamanya (Donaldson, 1991). Asumsi filosofi teori ini berdasarkan sifat-sifat manusia yang berupa dapat dipercaya, memiliki integritas, bertanggung jawab atas setiap tindakannya, dan berlaku jujur terhadap semua pihak. *Stewardship theory* menggambarkan bahwa manajemen dapat berperilaku baik demi kepentingan banyak pihak, sehingga tercipta hubungan yang kuat antara kepuasan organisasi dan kesuksesannya. Teori *stewardship* berasumsi terdapat utilitas yang lebih besar pada perilaku kooperatif dari pada perilaku individualis sehingga pihak pengelola akan melakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki dalam mengefektifkan pengendalian internal dan menciptakan komitmen organisasi yang baik dan kuat untuk menghasilkan *good village governance*. Implikasi *Stewardship theory* dalam penelitian ini adalah guna mendeskripsikan eksistensi pemerintah desa sebagai organisasi sektor publik yang dapat dipercaya, menampung aspirasi masyarakatnya, memberikan pelayanan yang baik, dan dapat mempertanggung jawabkan apa yang diamanahkan kepadanya. Sehingga dengan komitmen yang dimiliki aparat pemerintah desa dalam pemenuhan tujuan organisasi untuk mensejahterakan masyarakatnya dapat dicapai secara maksimal.

Teori *agency* dalam praktiknya telah terjadi hubungan kontraktual antara *principals* dan *agents* (Jansen dan Smith, 1984), prinsipal adalah pihak yang memberikan mandat kepada

pihak lain yaitu agen, agar melakukan kegiatan atas nama prinsipal dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. Pada organisasi sektor publik baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pemerintah desa pada dasarnya terdapat hubungan keagenan sehingga dapat dikaji dengan teori keagenan (*Agency Theory*). Dalam organisasi sektor publik yang dimaksud *principal* adalah rakyat dan *agent* adalah pemerintah dalam hal ini kepala desa dan aparat lainnya. Sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan memberikan penjelasan tentang adanya hubungan yang jelas antara teori agensi dan akuntabilitas. Akuntabilitas menjadi kewajiban agen/dalam hal ini kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut, akuntabilitas menjadi kata kunci bagi *good village governance*.

United National Development Program (UNDP) memberikan pengertian *Good Governance* sebagai berikut “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation's affair at all levels*”. *Good governance* adalah suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani, dan swasta dimana kesepakatan tersebut mencakup pembentukan seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan diantara mereka (Hasyim, 2014). *Good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. (Tahir, 2011). Menurut Sedarmayanti (2010:275) secara konseptual pengertian kata baik (*good*) dalam istilah pemerintahan yang baik (*good governance*) mengandung dua pemahaman: pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. Sembilan prinsip pada *good governance* menurut UNDP (*United Nations Development Programs*) dalam LAN (2008:61) yaitu partisipasi (*participation*), aturan hukum, transparansi, daya tanggap (*responsiveness*), berorientasi konsensus (*consensus orientation*), keadilan (*fairness*), efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas (*accountability*) dan bervisi strategi.

Sistem akuntansi adalah prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak di dalam dan di luar organisasi. Sedangkan Sistem Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 238/PMK.05/2011 adalah rangkaian sistematis dari prosedur penyelenggaraan, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Desa diwujudkan dalam Laporan Keuangan Pemerintahan Desa. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban keuangan Desa yang memadai, Laporan Keuangan Pemerintahan Desa disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa dalam Keppres Nomor 20 Tahun 2017 yang berisi tujuan laporan keuangan desa, tanggungjawab pelaporan keuangan desa, struktur dan isi, serta periode laporan keuangan. Akuntansi pada hakekatnya adalah proses pencatatan secara sistematis atas transaksi keuangan yang bermuara pada pelaporan untuk dapat dimanfaatkan oleh para pemakai untuk berbagai kebutuhan. Keadilan, transparansi, dan akuntabilitas serta tanggungjawab akan semakin membaik apabila didukung oleh suatu

sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang tepat waktu dan tidak menyesatkan. Sebaliknya sistem akuntansi yang usang, yang tidak informatif, yang tidak akurat, dan yang menyesatkan akan menghancurkan sendi-sendi keadilan, transparansi, dan akuntabilitas serta tanggung jawab. Implementasi sistem akuntansi pemerintahan sangat erat keterkaitannya dengan 4 (empat) prinsip *good governance* yaitu : keadilan (*fairness*), transparansi (*transparency*), dapat dikontrol atau tanggungjawab (*accountability*), tanggungjawab (*responsibility*). Studi empiris yang dilakukan oleh Mailoor et al., (2017) menunjukkan hasil bahwa sistem akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap *good governance*. Berdasarkan atas dasar dukungan teoritis dan bukti empiris yang telah dipaparkan sebelumnya, maka hipotesis pertama (H1) dapat diformulasikan sebagai berikut: *sistem akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap good governance*.

Gaya Kepemimpinan adalah proses untuk mempengaruhi orang lain untuk memahami dan setuju dengan apa yang perlu dilakukan dan bagaimana tugas itu dilakukan secara efektif, serta proses untuk memfasilitasi upaya individu dan kolektif untuk mencapai tujuan bersama (Yukl, 2010). Menurut Thoah (2013) bahwa Gaya Kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang ia lihat. Gaya kepemimpinan yang menunjukkan, secara langsung maupun tidak langsung, tentang keyakinan seorang pimpinan terhadap kemampuan bawahannya (Dwindra, 2018). Artinya gaya kepemimpinan adalah perilaku dan strategi, sebagai hasil kombinasi dari falsafah, keterampilan, sifat, sikap, yang sering diterapkan seorang pemimpin ketika ia mencoba memengaruhi kinerja bawahannya. Implementasi gaya kepemimpinan sangat erat keterkaitannya dengan 3 (tiga) prinsip *good governance* yaitu daya tanggap (*responsiveness*), berkeadilan, dan bervisi strategi. Untuk itu bagaimana gaya kepemimpinan dijalani dengan baik akan sangat mempengaruhi terhadap *good governance*. Studi empiris yang dilakukan oleh Mewengkang (2014) menunjukkan hasil bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap *good governance*. Berdasarkan atas dasar dukungan teoritis dan bukti empiris yang telah dipaparkan sebelumnya, maka hipotesis kedua (H2) dapat diformulasikan sebagai berikut: *gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap penerapan good governance*.

Budaya organisasi adalah sebuah sistem yang mempengaruhi cara karyawan dalam bertindak laku, cara menggambarkan pekerjaan dan cara bekerja dengan karyawan lainnya (Syafri, 2015). Budaya organisasi adalah sebuah aturan yang mempengaruhi cara karyawan dalam bertindak laku, cara menggambarkan pekerjaan dan bagaimana cara bekerja dengan karyawan lainnya. Budaya organisasi akan membentuk karakteristik pegawai yang berkerja di dalam sebuah Instansi. Dengan budaya organisasi yang baik maka akan terciptalah karakteristik yang baik pada pegawai tersebut. Apabila karakteristik yang terbentuk baik, maka sebuah Instansi akan mudah melakukan penerapan *Good Governance* pada Instansinya. Implementasi gaya kepemimpinan sangat erat keterkaitannya dengan 3 (tiga) prinsip *good governance* yaitu berorientasi konsensus, efektivitas dan efisiensi, dan bervisi strategi. Studi empiris yang dilakukan oleh Alfajrian et al., (2015) menunjukkan hasil bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap *good governance*. Berdasarkan atas dasar dukungan teoritis dan bukti empiris yang telah dipaparkan sebelumnya, maka hipotesis ketiga (H3) dapat diformulasikan sebagai berikut: *budaya organisasi berpengaruh terhadap penerapan good governance*.

METODE PENELITIAN

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa di Kabupaten Kampar yang berjumlah 242 desa. Alasan pengambilan populasi di Pemerintah Desa Kabupaten Kampar karena masih kurang adanya penerapan tata kelola pemerintah desa yang baik, dan adanya kasus terhadap kepala desa sebagai pemimpin yang menerapkan tata kelola pemerintah yang baik sehingga masih banyaknya kasus-kasus seperti korupsi.

Metode sampel adalah *Proportional Stratified Random Sampling* yaitu digunakan apabila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional (Sugiyono, 2012). Tahap pengambilan sampel dilakukan dengan mengambil sepuluh angka indeks desa membangun yang tertinggi dari setiap kategori desa. Namun, terdapat pengecualian untuk kategori desa mandiri, dikarenakan jumlah populasi pada kategori tersebut tidak mencapai 10 desa, sehingga peneliti memutuskan untuk mengambil seluruh populasi yang ada pada kategori desa tersebut untuk dijadikan sampel pada penelitian ini, sehingga didapatkan jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 41 Desa dengan 15 Kecamatan yang berbeda dari 21 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar. Dengan responden tiap desa terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan keuangan, ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sehingga diperoleh 164 responden.

Tabel 1. Definisi Operasional

Variabel	Indikator	Sumber	Butir pernyataan	Skala Pengukuran
Sistem Akuntansi Pemerintah	1. Identifikasi	Yusniyar et al (2016)	10, 11, 12	1-5
	2. Pengklasifikasian		13, 14, 15	
	3. Adanya sistem pengendalian untuk menjamin reabilitas		16, 17, 18, 19, 20	
	4. Menghitung masing-masing pengaruh operasi		21, 22	
Gaya Kepemimpinan	1. Visioner	Yulk (2010)	30, 31	1-5
	2. Pembimbing		24, 32	
	3. Afiliatif		25, 29	
	4. Demokratis		27, 28	
	5. Komunikatif		23, 26	
Budaya Organisasi	1. Inovasi	Robbins dan Judge (2015)	33, 34, 41	1-5
	2. Perhatian pada hal-hal rinci		35, 37, 39	
	3. Orientasi pada individu		36, 42	
	4. Orientasi pada hasil		38	
	5. Orientasi bersama		40	
Penerapan <i>Good Governance</i>	1. Partisipasi rakyat	Syafrion (2015)	1	1-5
	2. Aturan Hukum		4	
	3. Transparansi		9	
	4. Daya Tanggap		2	
	5. Berorientasi Konsensus		7	
	6. Berkeadilan		6	
	7. Efektivitas& Efisiensi		5	
	8. Akuntabilitas		8	
	9. Visi Strategi		3	

Tabel 2. Distribusi Kuesioner

Item	Jumlah	Persentase
Jumlah kuesioner yang disebar	164	100%
Jumlah kuesioner yang tidak kembali	32	20%
Jumlah kuesioner yang dapat diolah (sampel)	132	80%

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu berupa nilai atau skor atas jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pertanyaan yang ada dalam kuesioner. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer. Menurut Sugiyono (2012:193) Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sebagaimana mengacu pada Tabel 1, pengumpulan data primer dalam penelitian ini melalui cara menyebarkan kuesioner secara langsung dengan pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, masing-masing variabel diukur menggunakan skala likert yaitu skala (1) menunjukkan Sangat Tidak Setuju, skala (2) menunjukkan Tidak Setuju, skala (3) menunjukkan Ragu-ragu, skala (4) menunjukkan Setuju, dan skala (5) menunjukkan Sangat Setuju.

Teknik (metode) pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berbentuk kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang dijadikan responden untuk dijawabnya. Variabel dalam penelitian ini diukur menggunakan skala likert 5 poin. Skala 1 mempresentasikan “sangat rendah” dan skala 5 mempresentasikan “sangat tinggi”. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan menggunakan program *Statistical Package for Social Science (SPSS)* v.25. Persamaan analisis regresi linear berganda (Sugiyono, 2013) adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Penerapan *Good Governance*.

α = Konstanta.

X1 = Sistem Akuntansi Pemerintah.

X2 = Gaya Kepemimpinan.

X3 = Budaya Organisasi

b (1,2,3) = Koefisien Regresi.

e = Faktor Pengganggu (Error)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap Pemerintah Desa diberikan 4 kuesioner yang disebar kepada 41 Pemerintah Desa di Kabupaten Kampar yang terpilih menjadi sampel penelitian. Sehingga apabila ditotalkan secara menyeluruh jumlah responden yang menerima kuesioner berjumlah 164 responden. Dari 164 kuesioner yang disebar, kuesioner yang kembali sebanyak 132 kuesioner (80%) dan kuesioner yang tidak mendapat respon sebanyak 32 kuesioner (20%). Kuesioner yang dapat diolah lebih lanjut sebanyak 132 kuesioner atau (80%) dari total kuesioner yang dikirim. Tingkat pengembalian kuesioner dapat dilihat pada Tabel 2. Dari hasil analisis statistik deskriptif data tersebut, dapat diketahui bahwa variabel Penerapan *Good Governance* nilai minimum 32 dan nilai maksimum 45 serta nilai rata-rata 39,540, angka ini menunjukkan bahwa penerapan *Good Governance* Pemerintah Desa Kabupaten Kampar sudah baik. Standar deviasi untuk variabel Penerapan *Good Governance* menunjukkan angka 2,466. Dari Tabel 3 dapat diketahui bahwa variabel Sistem Akuntansi Pemerintah nilai rata-rata (*mean*) dari 132 responden adalah sebesar 57,260, nilai minimum sebesar 50 sedangkan nilai maksimum sebesar 65, yang artinya bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah Desa di Kabupaten Kampar sudah baik. Standar deviasi untuk Sistem Akuntansi Pemerintah menunjukkan angka 3,144. Kemudian untuk variabel Gaya Kepemimpinan memiliki nilai minimum 32.

Tabel 3. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

<i>Variable</i>	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
Sistem Akuntansi Pemerintah	132	50	65	57,260	3,144
Gaya Kepemimpinan	132	32	50	43,870	2,979
Budaya Organisasi	132	37	50	44,670	2,794
Penerapan <i>Good Governance</i>	132	32	45	39,540	2,466
Valid N (<i>listwise</i>)	132				

Adapun, nilai maksimum dari variabel Gaya Kepemimpinan sebesar 50 serta rata-rata sebesar 43,870. Angka ini menunjukkan tingkat gaya kepemimpinan pemerintah desa Kabupaten Kampar sudah baik. Standar deviasi untuk Gaya Kepemimpinan menunjukkan angka 2,979. Variabel Budaya Organisasi terdiri dari 10 pertanyaan dengan nilai minimum sebesar 37 sedangkan nilai maksimum sebesar 50 rata-rata 44,670. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat Budaya Organisasi Pemerintah Desa Kabupaten Kampar sudah baik dan standar diviasinya menunjukkan angka 2,794. Setelah dilakukan pengolahan data, hasil pengujian validitas untuk variabel Kecenderungan sistem akuntansi pemerintah, gaya kepemimpinan, budaya organisasi dan penerapan *good governance* sudah valid valid dimana nilai *Correlated Item Total Correlation* yang dapat dilihat dengan *r* hitung lebih besar dari *r* tabel untuk *degree of freedom* (*df*) = *n*-2 yaitu korelasi *product moment* (*r*-hitung) untuk masing-masing item pertanyaan lebih besar dari nilai *r*-tabel sebesar 0,171 (taraf signifikansi 5% dan *n* = 132). Untuk hasil pengujian reliabilitas yang menunjukkan setiap variabel reliabel dimana nilai koefisien *Cronbach Alpha* berada diatas 0,700. Berarti variabel yang digunakan sudah konsisten dan dapat dipercaya.

Tabel 4 menunjukkan hasil uji validitas dari kuesioner yang memuat pernyataan tentang Sistem Akuntansi Pemerintah. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai korelasi *product moment* (*r*-hitung) untuk masing-masing item pertanyaan lebih besar dari nilai *r*-tabel sebesar 0,171 (taraf signifikansi 5% dan *n* = 132) sehingga dapat disimpulkan bahwa item-item dari pernyataan tersebut dinyatakan valid, dan dapat digunakan untuk pengambilan data. Tabel 5 menunjukkan hasil uji validitas dari kuesioner yang memuat pernyataan tentang Gaya Kepemimpinan.

Dari Tabel 5, dapat disimpulkan bahwa nilai korelasi *product moment* (*r*-hitung) untuk masing-masing item pertanyaan lebih besar dari nilai *r*-tabel sebesar 0,171 (taraf signifikansi 5% dan *n* = 132) sehingga dapat disimpulkan bahwa item-item dari pernyataan tersebut dinyatakan valid, dan dapat digunakan untuk pengambilan data. Adapun Tabel 6 menunjukkan hasil uji validitas dari kuesioner yang memuat pernyataan tentang Budaya Organisasi. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai korelasi *product moment* (*r*-hitung) untuk masing-masing item pertanyaan lebih besar dari nilai *r*-tabel sebesar 0,171 (taraf signifikansi 5% dan *n* = 132) sehingga dapat disimpulkan bahwa item-item dari pernyataan tersebut dinyatakan valid, dan dapat digunakan untuk pengambilan data.

Tabel 7 menunjukkan hasil uji validitas dari kuesioner yang memuat pernyataan tentang Penerapan *Good Governance*. Dari Tabel 7, dapat disimpulkan bahwa nilai korelasi *product moment* (*r*-hitung) untuk masing-masing item pertanyaan lebih besar dari nilai *r*-tabel sebesar 0,171 (taraf signifikansi 5% dan *n* = 132) sehingga dapat disimpulkan bahwa item-item dari pernyataan tersebut dinyatakan valid, dan dapat digunakan untuk pengambilan data. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan koefisien *Cronbach Alpha* dengan bantuan program SPSS. Nilai alpha bervariasi dari 0 -1, suatu pertanyaan dapat dikategorikan reliabel jika nilai alpha lebih besar dari 0,700 (Ghozali, 2013).

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Sistem Akuntansi Pemerintah

Variabel	Pernyataan	r hitung	r tabel	Keputusan
Sistem Akuntansi Pemerintah (X1)	X1.1	0,372	0,171	Valid
	X1.2	0,302	0,171	Valid
	X1.3	0,482	0,171	Valid
	X1.4	0,503	0,171	Valid
	X1.5	0,369	0,171	Valid
	X1.6	0,449	0,171	Valid
	X1.7	0,366	0,171	Valid
	X1.8	0,492	0,171	Valid
	X1.9	0,425	0,171	Valid
	X1.10	0,669	0,171	Valid
	X1.11	0,640	0,171	Valid
	X1.12	0,628	0,171	Valid
	X1.13	0,512	0,171	Valid

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Gaya Kepemimpinan

Variabel	Pernyataan	r hitung	r tabel	Keputusan
Gaya Kepemimpinan (X2)	X2.1	0,617	0,171	Valid
	X2.2	0,553	0,171	Valid
	X2.3	0,500	0,171	Valid
	X2.4	0,514	0,171	Valid
	X2.5	0,564	0,171	Valid
	X2.6	0,642	0,171	Valid
	X2.7	0,486	0,171	Valid
	X2.8	0,618	0,171	Valid
	X2.9	0,590	0,171	Valid
	X2.10	0,635	0,171	Valid

Jika nilai reliabilitas kurang dari 0,700 maka nilainya kurang baik. Artinya adalah bahwa alat ukur yang digunakan tidak *reliable*. Hasil pengujian reliabilitas terhadap instrumen penelitian ini bisa dilihat dalam Tabel 8. Mengacu pada Tabel 8, dapat disimpulkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* atas variabel Sistem Akuntansi Pemerintah sebesar 0,714, Gaya Kepemimpinan sebesar 0,771, Budaya Organisasi sebesar 0,747, dan Penerapan *Good Governance* sebesar 0,701. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini reliabel karena mempunyai *Cronbach's Alpha* > 0,700. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten yang berarti bila pernyataan itu diajukan kembali akan memperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya.

Hasil pengujian hipotesis ditunjukkan pada Tabel 9. Pengujian hipotesis ini menggunakan tingkat signifikan (α) 5%. Jika $P \text{ value (sig)} < \alpha$ (α), maka terdapat pengaruh secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian atas variabel-variabel penelitian menggunakan analisis regresi linier berganda dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan atau tidak antara semua variabel independen terhadap Penerapan *Good Governance*.

Tabel 6. Hasil Uji Validitas Budaya Organisasi

Variabel	Pernyataan	r hitung	r tabel	Keputusan
Budaya Organisasi (X3)	X3.1	0,284	0,171	Valid
	X3.2	0,572	0,171	Valid
	X3.3	0,493	0,171	Valid
	X3.4	0,620	0,171	Valid
	X3.5	0,471	0,171	Valid
	X3.6	0,493	0,171	Valid
	X3.7	0,641	0,171	Valid
	X3.8	0,540	0,171	Valid
	X3.9	0,707	0,171	Valid
	X3.10	0,690	0,171	Valid

Tabel 7. Hasil Uji Validitas Penerapan *Good Governance*

Variabel	Pernyataan	r hitung	r tabel	Keputusan
Penerapan <i>Good Governance</i> (Y)	Y.1	0,644	0,171	Valid
	Y.2	0,547	0,171	Valid
	Y.3	0,625	0,171	Valid
	Y.4	0,313	0,171	Valid
	Y.5	0,540	0,171	Valid
	Y.6	0,567	0,171	Valid
	Y.7	0,400	0,171	Valid
	Y.8	0,662	0,171	Valid
	Y.9	0,601	0,171	Valid

Dari Tabel 9, dapat dilihat bahwa t_{hitung} sebesar 2,584 lebih besar dari pada t -tabel 1,979 dan taraf signifikansi 0,011 lebih kecil daripada tingkat keyakinan 5% atau 0,050. Hal ini menyebabkan H_0 ditolak dan H_1 **diterima** sehingga variabel Sistem Akuntansi Pemerintah (X1) berpengaruh terhadap penerapan *Good Governance* (Y). Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa sistem akuntansi pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerapan *Good Governance* di Kabupaten Kampar. Dengan adanya sistem akuntansi pemerintah akan meningkatkan penerapan *Good Governance* jika sistem dan prosedur yang digunakan sesuai dengan SAP, agar laporan keuangan lebih berguna, dapat dimengerti, dapat diperbandingkan serta tidak menyesatkan. Karena dengan adanya sistem akuntansi pemerintah dalam penyelenggaraan kegiatan pada pemerintah desa, masyarakat tidak hanya mengetahui anggaran tetapi juga mengetahui pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan sehingga mengharuskan pemerintah memberikan pertanggungjawaban dan informasi kepada masyarakat terkait pengelolaan pemerintah yang menyebabkan pemerintah berusaha untuk senantiasa memberikan kinerja terbaiknya karena akan dinilai dan diawasi oleh masyarakat.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mailoor et al. (2017) di Kabupaten Kepulauan Talaud menunjukkan bahwa sistem akuntansi pemerintah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerapan *good governance*, jika sistem dan prosedur yang digunakan sesuai dengan SAP, serta informasi laporan keuangan dilakukan secara konsisten dan periodik serta didukung dengan sumber daya manusia yang berkompeten.

Tabel 8. Hasil Uji Reabilitas Data

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Sistem Akuntansi Pemerintah	0,714	Reliabel
Gaya Kepemimpinan	0,771	Reliabel
Budaya Organisasi	0,747	Reliabel
Penerapan Good Governance	0,701	Reliabel

Tabel 9. Hasil Uji Regresi Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		Beta	Std. Error	Beta		
1	Constant	10,933	3,828		2,856	0,005
	Sistem Akuntansi Pemerintah	0,185	0,071	0,235	2,584	0,011
	Gaya Kepemimpinan	0,252	0,070	0,304	3,590	0,000
	Budaya Organisasi	0,156	0,072	0,177	2,179	0,031

Dari Tabel 9, dapat dilihat bahwa $t = 3,590$ lebih besar dari pada t -tabel 1,979 dan taraf signifikansi 0,000 lebih kecil daripada tingkat keyakinan 5% atau 0,050. Hal ini menyebabkan H_0 ditolak dan **H_2 diterima** sehingga variabel Gaya Kepemimpinan (X_2) berpengaruh terhadap penerapan *Good Governance* (Y). Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa Gaya Kepemimpinan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerapan *Good Governance* di Kabupaten Kampar. Dengan kata lain penerapan prinsip-prinsip good governance di desa sangat tergantung pada gaya kepemimpinan yang digunakan oleh hukum tua dalam memimpin perangkat desa. Hal ini dapat dibenarkan secara teoritis, karena gaya kepemimpinan sangat menentukan keberhasilan seorang pemimpin bagaimana menggerakkan para bawahannya dalam melaksanakan tugas pekerjaan mereka dalam menjalankan misi dan tujuannya. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Hidayah dan Suprojo (2018) di Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji Kota Batu, Gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap penerapan *good governance*. Hasil analisis dapat diartikan bahwa dengan adanya perubahan kepemimpinan situasional maka *good governance* juga akan mengalami peningkatan yang berarti adanya peningkatan dari indikator gaya kepemimpinan situasional yang meliputi perilaku kepemimpinan efektif, gaya tertentu, petunjuk pimpinan, adanya dukungan sosio emosional, tingkat kesiapan, kematangan para pengikut dan pengarahan dari pimpinan maka *good governance* akan mengalami peningkatan.

Dari Tabel 9, dapat dilihat bahwa $t = 2,179$ lebih besar dari pada t -tabel 1,979 dan taraf signifikansi 0,031 lebih kecil daripada tingkat keyakinan 5% atau 0,050. Hal ini menyebabkan H_0 ditolak dan **H_3 diterima** sehingga variabel Budaya Organisasi (X_3) berpengaruh terhadap penerapan *good governance* (Y). Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa Budaya Organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerapan *good governance* di Kabupaten Kampar. ini berarti apabila budaya organisasi diterapkan dengan baik dan ditampung serta dikelola dengan baik maka akan mewujudkan tata kelola pemerintah pemerintah desa yang baik di Kabupaten Kampar. Budaya organisasi di dalam pemerintahan merupakan implementasi nilai-nilai luhur dari Pancasila yang merupakan sebuah aturan yang mempengaruhi cara karyawan dalam bertindak laku, cara menggambarkan pekerjaan dan bagaimana cara bekerja dengan karyawan lainnya. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu Syafrion (2015) terhadap penerapan *Good Governance* di

Kota Solok menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap penerapan *good governance*. Hal ini membuktikan bahwa budaya organisasi bisa membentuk karakteristik pegawai yang berkerja di dalam suatu pemerintahan. Dengan budaya organisasi yang baik maka akan melekatlah sikap yang baik pada pegawai tersebut.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah Sistem Akuntansi Pemerintah *Good Governance*, Gaya Kepemimpinan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Penerapan *Good Governance* Pemerintah Desa di Kabupaten Kampar, artinya semakin tinggi penerapan sistem akuntansi pemerintah desa, semakin baik gaya kepemimpinan pemerintah dalam memimpin lingkungannya, serta semakin tinggi tingkat kepedulian dalam budaya organisasi tiap pemerintahan, maka akan semakin baik pula penerapan *good governance* pada pemerintah desa.

Implikasi pada penelitian ini yaitu bagi Pemerintah Desa, penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan pemerintah dalam memberikan regulasi dan kebijakan yang tepat dalam meningkatkan tata kelola pemerintah desa yang baik. Pemerintah desa juga dapat lebih menyadari bahwa kualitas sistem akuntansi pemerintah, gaya kepemimpinan, dan budaya organisasi ternyata sangat memengaruhi tata kelola pemerintah desa sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam segala aspek baik dalam pengambilan keputusan. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masyarakat lebih sadar akan kerja sama terhadap pemerintah desa untuk mengembangkan desa lebih baik lagi. Dari hasil penelitian ini masyarakat juga tahu bahwa adanya transparan dan akuntabel terhadap keuangan desa yang yang bisa dijadikan informasi untuk melakukan kegiatan yang ada di desa. Pada intinya tata kelola pemerintahan yang baik melibatkan berbagai pihak secara terintegrasi. Sistem pemerintahan tidak akan berjalan optimal apabila lembaga tidak didukung oleh partisipasi aktif oleh elemen masyarakat, untuk itu diperlukan kesadaran serta pengetahuan agar masyarakat dapat berpikir kritis mengenai kebijakan yang seharusnya dilakukan. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sudah dengan jumlah minimal sampel yang dibutuhkan. Kedua, Pengambilan data dalam penelitian ini hanya didasarkan kepada isian kuesioner sehingga dimungkinkan adanya unsur kurang obyektif di dalam pengisian kuesioner. Ketiga, Penelitian ini hanya menggunakan variabel sistem akuntansi pemerintah, gaya kepemimpinan, dan budaya organisasi sehingga kemungkinan ada variabel lain lagi yang mempengaruhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, R. (2015). Pengaruh Peran Auditor Internal, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Audit Terhadap Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Government Governance*). *Jurnal Akuntansi*.
- Alfajrian., Yunus, Mukhlis., & P, R. I. (2015). Pengaruh Komitmen Organisasi, SDM dan Budaya Organisasi Terhadap *Good Governance* Pemerintah Aceh dengan Penerapan E-Government Sebagai Mediating Variable pada Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi dan Telematika. Univeristasi Syiah Kuala. Volume 4 (3), 62-71, Agustus 2015.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar. (2019). *Kabupaten Kampar dalam Angka 2019*. <https://kamparkab.bps.go.id/publication.html>

- Fathoni, M., Suryadi, & Rengu, S. P. (2015). Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa (Studi Kasus di Desa Denok Kec. Lumajang, Kab. Lumajang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP) Universitas Brawijaya*, 3, No. 1(1), 139-146.
- Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariete. *Badan Penerbit Universitas Dipenegoro*.
- Hidayah, N. dan A. S. (2018). Pengaruh Kepimimpinan Situasional Terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai Dan Terciptanya Good Governance. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang*.
- Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntan Sektor Publik [IAI-KASP]. (2015). Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa. *Ikatan Akuntansi Indonesia*, 1-75. <https://doi.org/10.1306/1D9BD15F-172D-11D7-8645000102C1865D>
- Ihsanuddin. (2018). ICW: Ada 181 Kasus Korupsi Dana Desa, Rugikan Negara Rp 40,6 Miliar. <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/21/19000481/icw-%09ada-%09181-kasus-korupsi-dana-desa-rugikan-negara-rp-406-miliar?page=all> diakses pada tanggal 5 Oktober 2019
- Indeks Desa Membangun. (2019). http://idm.kemendes.go.id/index.php/idm_data
- Pemerintah Republik Indonesia (2017). Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Standar Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa.
- Lembaga Administrasi Negara. (2008). *Dasar-Dasar Kepemerintahan yang Baik*. Jakarta: LAN RI
- Mailoor, J. H., Sondakh, J. J., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintahan, Budaya Organisasi, Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Peran APIP, Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Penerapan Good Governance (Studi Empiris Di Kabupaten Kepulauan Talaud). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(2), 82-94. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17175>
- Manossoh, H. (2015). Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Good Government Governance Initiate Good Government Governance in. *Berkala Ilmiah Efensi*, 15(05), 777-789.
- Mewengkang, N. (2014). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Hukum Tua Terhadap Keberhasilan Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Di Desa Kauditan Satu Kecamatan Kauditan. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(2).
- Nurul, H., & Agung, S. (2019). Pengaruh Kepemimpinan Situasional terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai dan Terciptanya Good Governance. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 7(3), 106-111.
- Rivai, Veithzal, dkk. (2014). *Pemimpin dan kepemimpinan dalam organisasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Robbins, S. P. dan T. A. J. (2015). *Perilaku Organisasi* (16th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Rondonuwu, A., Rompas, W., & Pombengi, J. (2015). Implementasi Good Governance di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Administrasi Publik UNSRAT*, 2(029), 1316.
- Sari, D. (2013). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah, Penyelesaian Temuan Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah & Implikasinya Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. *Indonesian Journal Of Economics And Business IJEB*, September 2013, 43.

- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. ALFABETA.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Syafrion, F. Y. (2015). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pengelolaan Keuangan Daerah, Komitmen Organisasi Dan Budaya Organisasi Terhadap Penerapan Good Governance*. 2.
- Yukl, G. (2010). *Kepemimpinan dalam organisasi* (5th ed.). Jakarta: PT Indeks.